

Katalog BPS: 9302002.1605

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

Gross Regional Domestic Product by Expenditure

Kabupaten Musi Rawas/
Musi Rawas Regency

2013-2017

<https://musirawaskab.bps.go.id>



*Badan Pusat Statistik
Kabupaten Musi Rawas*

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Palembang, Juli 2018
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Musi Rawas,

Drs. Timbul Parulian Silitonga, M.Si

I	BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	3
1.2	KEGUNAAN STATISTIK PDRB.....	4
II	BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
2.1	PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT).....	7
2.2	PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NONPROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)9	
2.3	PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P).....	11
2.4	PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	13
2.5	PERUBAHAN INVENTORI (PI).....	16
2.6	EKSPOR - IMPOR.....	19
III	BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MUSI RAWAS MENURUT PDRB PENGELUARAN	
2013 -2017	21
3.1	TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN MUSI RAWAS MENURUT PENGELUARAN	23
3.2	PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	28
3.3	PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT.....	33
3.4	PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH.....	33
3.5	PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	35
3.6	PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI.....	37
3.7	PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR WILAYAH	38
3.8	PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR WILAYAH.....	39
3.9	PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH	40
IV	BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN MUSI RAWAS	
TAHUN 2013 - 2017	41
4.1	PDRB (Nominal).....	43
4.2	PERBANDINGAN PENGGUNAAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR	44
4.3	PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB.....	45
4.4	PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB.....	46
4.5	PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB.....	47
4.6	PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR	47
4.7	KESEDIAAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN.....	48
4.8	NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)	49
4.9	INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR).....	50
V	PENUTUP	53
VI	LAMPIRAN	57
VII	DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

<https://musirawaskab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estate, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak lainnya atas produksi neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak lainnya atas produksi neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu negara. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), yaitu sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut :

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *supply* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke-1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke-2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut :

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

- a. PK-P Provinsi atas dasar harga berlaku (ADHB)

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar** dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

- b. PK-P Provinsi atas dasar harga konstan (ADHK)

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial*

leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
 - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas).
 - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
 - i. Publikasi Statistik Konstruksi.
 - j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.
2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*inflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Transport and Trade Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu

- dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
 - e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
 - f. Ternak untuk tujuan dipotong;
 - g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
 - h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan

inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR DAN IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari

kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data
 - a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
 - b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
 - c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
 - d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
 - e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
 - f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
 - g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan

transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://musirawaskab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), yaitu sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut :

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *supply* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti

hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke-1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke-2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini

berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan

- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, telex, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

- \bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
- i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
- j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut :

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

- a. PK-P Provinsi atas dasar harga berlaku (ADHB)

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

<p>PK-P ADHB =</p> <p>Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia</p>

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi

pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi atas dasar harga konstan (ADHK)

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
 - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
 - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
 - i. Publikasi Statistik Konstruksi.
 - j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas

aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*inflate*”(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Transport and Trade Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas

ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan pengalihan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah

pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR DAN IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data
 - a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
 - b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
 - c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
 - d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
 - e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
 - f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
 - g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB)

dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://musirawaskab.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MUSI RAWAS BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KABUPATEN MUSI RAWAS 2013 - 2017

<https://musirawaskab.bps.go.id>

Faktor internal dan eksternal adalah dua faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2013 s.d 2017. Faktor internal dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Musi Rawas digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN MUSI RAWAS MENURUT PENGELUARAN

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	<i>(Juta Rp)</i>				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8,947,161.1	9,850,269.0	10,365,179.3	11,094,025.5	11,717,812.0
2. Konsumsi LNPRT	131,312.0	160,728.3	177,084.1	191,225.1	203,188.4
3. Konsumsi Pemerintah	1,134,720.6	1,261,300.6	1,360,061.0	1,290,095.5	1,513,475.7
4. PMTB	4,216,086.9	4,637,906.8	4,596,949.6	4,968,024.9	5,220,685.3
5. Perubahan Inventori	300,634.1	130,652.8	283,636.2	330,274.3	178,985.1
6. Ekspor	4,194,449.4	4,416,735.3	4,568,145.7	4,774,243.9	6,346,280.7
7. Impor	6,951,822.5	7,081,262.3	7,212,022.2	7,738,151.8	9,252,537.4
Total PDRB	11,972,541.7	13,376,330.4	14,139,033.7	14,909,737.5	15,927,889.7

Kondisi perekonomian Musi Rawas menunjukkan tanda pemulihan setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan

ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK serta pertumbuhan pada total PDRB.

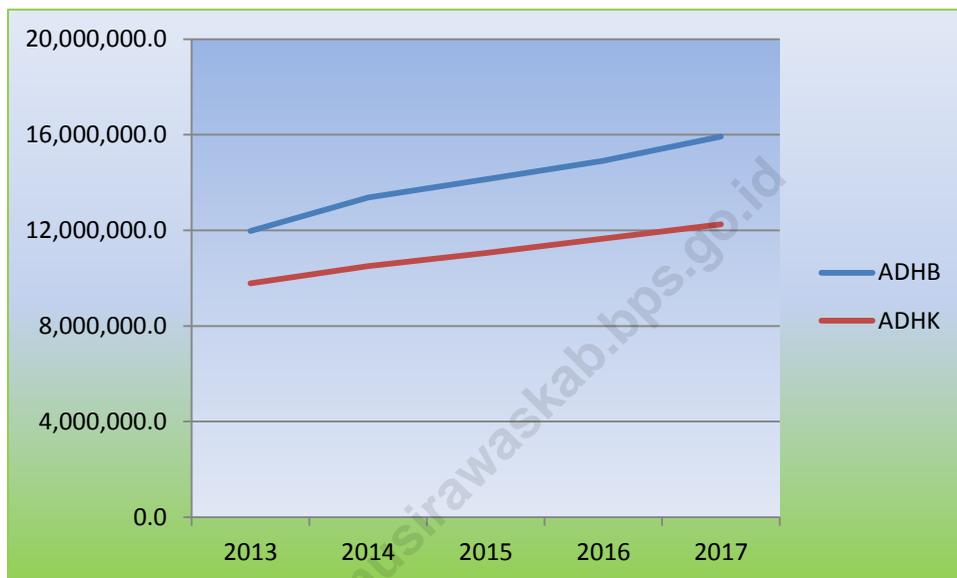
Nilai PDRB Musi Rawas (adh Berlaku) selama periode tahun 2013 s.d 2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2013-2017**

Komponen Pengeluaran	<i>(Juta Rp)</i>				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,849,625.9	7,163,318.5	7,438,519.6	7,754,769.8	7,943,178.1
2. Konsumsi LNPRT	114,256.2	127,876.4	137,121.9	145,111.2	149,936.6
3. Konsumsi Pemerintah	990,125.1	1,011,761.9	1,061,961.2	991,308.7	1,088,023.0
4. PMTB	3,631,284.0	3,698,644.7	3,699,834.9	3,869,732.3	4,064,864.7
5. Perubahan Inventori	129,810.6	334,218.7	140,015.5	191,258.5	89,550.5
6. Ekspor	4,420,678.7	4,601,901.6	4,479,030.9	4,404,719.1	5,657,280.1
7. Impor	6,347,215.0	6,427,645.9	5,906,779.8	5,709,406.5	6,738,407.2
Total PDRB	9,788,565.6	10,510,076.1	11,049,704.1	11,647,493.1	12,254,425.7

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2013-2017 gambaran tentang perkembangan ekonomi Musi Rawas berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2013 – 2017



Dari grafik di atas nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2013—2017**

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	74.73	73.64	73.31	74.41	73.57
2. Konsumsi LNPRT	1.10	1.20	1.25	1.28	1.28
3. Konsumsi Pemerintah	9.48	9.43	9.62	8.65	9.50
4. PMTB	35.21	34.67	32.51	33.32	32.78
5. Perubahan Inventori	2.51	0.98	2.01	2.22	1.12
6. Ekspor	35.03	33.02	32.31	32.02	39.84
7. Impor	58.06	52.94	51.01	51.90	58.09
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2013 – 2017 produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 70 persen). Ekspor juga mempunyai peran yang besar sekitar 30 persen produk Musi Rawas mampu bersaing dengan wilayah lain. Demikian halnya impor, karena sekitar 50 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor, baik luar negeri maupun luar provinsi. Di sisi lain, pengeluaran untuk modal (PMTB) juga mempunyai peran yang cukup besar dengan kontribusi sekitar 32 s.d 35 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 8-9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2013 - 2017 perdagangan Musi Rawas yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai impor cenderung lebih tinggi dari nilai ekspor, kecenderungan perdagangan Musi Rawas dalam periode tersebut masih bergantung pada barang-barang dari luar daerah.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2013—2017**

Komponen Pengeluaran	<i>(Persen)</i>				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.32	4.58	3.84	4.25	2.43
2. Konsumsi LNPRT	10.36	11.92	7.23	5.83	3.33
3. Konsumsi Pemerintah	7.14	2.19	4.96	-6.65	9.76
4. PMTB	5.20	1.86	0.03	4.59	5.04
5. Perubahan Inventori	-65.64	157.47	-58.11	36.60	-53.18
6. Ekspor	14.71	4.10	-2.67	-1.66	28.44
7. Impor	6.46	1.27	-8.10	-3.34	18.02
Total PDRB	5.80	7.37	5.13	5.41	5.21

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Musi Rawas dari tahun 2013 s.d 2017 secara rata-rata diatas 5 persen. pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 7,37 persen dan terendah terjadi pada tahun 2015 (5,13 persen).

Sementara itu indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri), juga menunjukkan peningkatan. Indeks Implisit Musi Rawas dari tahun 2013 s.d 2017 secara berturut-turut

¹ Indeks perkembangan

masing-masing menunjukkan 122,31 persen (2013); 127,27 persen (2014); 127,96 persen (2015); 128,01 persen (2016); dan 129,98 persen (2017).

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 – 2017

Komponen Pengeluaran	<i>(Persen)</i>				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	130.62	137.51	139.34	143.06	147.52
2. Konsumsi LNPRT	114.93	125.69	129.14	131.78	135.52
3. Konsumsi Pemerintah	114.60	124.66	128.07	130.14	139.10
4. PMTB	116.10	125.39	124.25	128.38	128.43
5. Perubahan Inventori	231.59	39.09	202.57	172.68	199.87
6. Ekspor	94.88	95.98	101.99	108.39	112.18
7. Impor	109.53	110.17	122.10	135.53	137.31
Total PDRB	122.31	127.27	127.96	128.01	129.98

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (*adh Berlaku*) maupun riil (*adh Konstan*), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013 sampai dengan 2017 cukup berfluktuatif. Tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 74,73 persen dan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 73,31 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi termasuk konsumsi rumah tangga.

**Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	8,947,161.1	9,850,269.0	10,365,179.3	11,094,025.5	11,717,812.0
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	6,849,625.9	7,163,318.5	7,438,519.6	7,754,769.8	7,943,178.1
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	74.73	73.64	73.31	74.41	73.57
Rata-rata konsumsi per- Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	94 529,91	102 618,73	106 512,72	112 564,56	117 342,40
b. ADHK 2010	72 368,71	74 626,45	76 438,33	78 683,10	79 543,14
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	23 942,03	25 990,16	26 971,58	28 504,76	29 710,33
b. ADHK 2010	18 329,16	18 900,58	19 356,02	19 924,95	20 139,80
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	5,32	4,58	3,84	4,25	2,43
b. Per-RT		3,12	2,43	2,94	1,09
c. Perkapita		3,12	2,41	2,94	1,08
Jumlah RT (<i>unit</i>)	94 649	95 989	97 314	98 557	99 860
Jumlah penduduk (<i>org</i>)	373 701	379 000	384 300	389 199	394 402

Secara umum rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2013, secara umum setiap

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

rumah tangga di Musi Rawas menghabiskan dana sekitar 72.368,71 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang perumahan pendidikan dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 79.543,14 ribu rupiah pada tahun 2017.

Sementara itu, pada perkiraan adh Konstan 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 2,40 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,12 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan perkembangan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Musi Rawas meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 1,08 s.d 3,12 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013—2017³

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan Minuman dan Rokok	56.60	57.61	56.13	56.42	56.21
b. Pakaian dan Alas Kaki	6.02	6.23	6.37	6.20	6.13
c. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9.68	9.45	9.76	9.66	9.57
d. Kesehatan & Pendidikan	8.05	7.52	7.87	7.89	8.05
e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	9.88	10.05	10.40	10.32	10.43
f. Hotel & Restoran	4.04	3.94	4.18	4.21	4.21
g. Lainnya	5.73	5.20	5.30	5.31	5.40
Total Konsumsi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 3,12 persen pada tahun 2014. Kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya dimana hanya tumbuh 1,09 persen pada tahun 2017. Sementara itu konsumsi per-kapita menurun dari 3,12 persen ditahun 2014 menjadi 1,08 pada tahun 2017. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen dan ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat.

Secara rata-rata dari tahun 2013 s.d 2017 nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Musi Rawas, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran 56-57 persen.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013—2017

<i>(Persen)</i>					
Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan Minuman dan Rokok	10.66	6.28	5.59	9.32	4.78
b. Pakaian dan Alas Kaki	4.16	10.81	4.55	2.18	1.84
c. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14.15	6.35	16.42	6.33	2.95
d. Kesehatan & Pendidikan	13.77	7.80	14.59	10.07	5.21
e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	13.85	29.48	16.62	14.12	10.30
f. Hotel & Restoran	5.17	5.25	8.13	2.81	1.91
g. Lainnya	1.74	2.04	5.17	4.18	3.27

Dilihat dari pertumbuhan pengeluaran rumah tangga untuk setiap kelompok konsumsi menunjukkan fluktuasi. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013—2017⁴

<i>(Persen)</i>					
Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	18.29	22.44	10.30	7.86	5.27
b. Pakaian dan Alas Kaki	5.53	2.73	2.93	1.94	2.61
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-0.79	3.57	3.50	-0.14	6.50
d. Kesehatan & Pendidikan	7.58	-1.55	2.42	2.73	9.26
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	7.98	4.47	6.43	0.04	11.47
f. Hotel & Restoran	7.88	2.04	3.17	4.94	3.72
g. Lainnya	4.87	-2.04	1.80	2.93	4.05

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Peningkatan harga (inflasi) tertinggi yang terjadi pada tahun 2014 pada sub kelompok makanan. Pada sub kelompok pakaian dan alas kaki tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,53 persen. Pada sub kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumahtangga, terjadi peningkatan harga yang cukup signifikan pada tahun 2017 hingga mencapai 6,50 persen. Kondisi yang sama terjadi pada sub

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

kelompok kesehatan dan pendidikan, bahkan pada tahun 2014, subkelompok ini mengalami deflasi sebesar 1,55 persen. Kemudian pada kelompok berikutnya yaitu Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya, peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2017 (11,47 persen). Adanya kebijakan pemerintah yang baru mengenai penyelenggaraan kegiatan yang tidak boleh di hotel menyebabkan terjadinya penurunan harga untuk kelompok hotel dan restoran hanya sebesar 2,04 persen di tahun 2014. Kelompok konsumsi lainnya mengalami peningkatan harga tertinggi di tahun 2014 (4,87 persen).

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi.

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a, ADHB (<i>Juta Rp</i>)	131 312,0	160 728,3	177 084,1	191 225,1	203 188,4
b, ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	114 256,2	127 876,4	137 121,9	145 111,2	149 936,6
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,10	1,20	1,25	1,28	1,28

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir LNPRT adh Berlaku sebesar 131 milyar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 203 milyar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi LNPRT adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran LNPRT dari sisi kuantitas. Dari tahun 2013-2017 peran LNPRT terhadap total PDRB berkisar antara 1,10 – 1,28 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRM merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Musi Rawas serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 1134,7 milyar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 1513,5 milyar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	1 134 720,6	1 261 300,6	1 360 061,0	1 290 095,5	1 513 475,7
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	990 125,1	1 011 761,9	1 061 961,2	991 308,7	1 088 023,0
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	9.48	9.43	9.62	8.65	9.50
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	3 036,44	1 246,64	3 539,06	3 314,74	3 837,39
b. ADHK 2010	2 649,51	2 669,56	2 763,36	2 547,05	2 758,66
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB				241,23	243,99
b. ADHK 2010				185,36	175,42
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	7,14	2,19	4,96	-6,65	9,76
b. Konsumsi perkapita					
c. Konsumsi per-pegawai					
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁶				5 348	6 203

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

⁶ Tidak termasuk polisi dan militer

Jumlah penduduk (<i>org</i>)	373 701	379 000	384 300	389 199	394 402
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 – 2017

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami kestabilan yaitu diatas 8 persen. Sepanjang periode tersebut proporsi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 8,65 persen sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai 9,62 persen. Peningkatan tersebut didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 3036 milyar rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2017 (lihat Tabel 11).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang berfluktuatif. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 241 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 244 juta rupiah pada tahun 2017 (lihat Tabel 11). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan kecenderungan yang berfluktuatif.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB menurut pengeluaran menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi fisik. Pada sisi berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁷. Kapital berfungsi sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di

⁷ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 - 2017 berfluktuasi dari 4,74 persen (2013) menjadi 7,56 persen (2017). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung meningkat tetapi polanya relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB non bangunan.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2013—2017

U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	4,216,086.9	4,637,906.8	4,596,949.6	4,968,024.9	5,220,685.3
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	3,631,284.0	3,698,644.7	3,699,834.9	3,869,732.3	4,064,864.7
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	35.21	34.67	32.51	33.32	32.78
Struktur PMTB ⁸					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	2,336,439.4	2,351,876.8	2,355,895.2	2,483,260.2	2,649,445.0
(%)	(64,34)	(63,59)	(63,68)	(64,17)	(65,18)
b. Non Bangunan (<i>Mil Rp</i>)	1,294,844.6	1,346,767.9	1,343,939.7	1,386,472.1	1,415,419.6
(%)	(35,66)	(36,41)	(36,32)	(35,83)	(34,82)
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	4,216,086.9	4,637,906.8	4,596,949.6	4,968,024.9	5,220,685.3
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ⁹ (%)					
a. Bangunan	5.93	0.66	0.17	5.41	6.69

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

b. Non Bangunan	3,92	4,01	-0,21	3,16	2,09
Total PMTB	5,20	1,86	0,03	4,59	5,04

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB berfluktuasi selama periode 2013 – 2017 (Tabel 13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2013 sebesar 5,93 persen dan mengalami perlambatan hingga tahun 2015, dan mengalami percepatan hingga tumbuh 6,69 persen pada tahun 2017.

Sementara itu, sub komponen non bangunan menunjukkan pola yang sama, tetapi berbeda pada tahun 2015. Dalam periode tahun 2013 sampai dengan 2014 pertumbuhan non bangunan mengalami fluktuasi pertumbuhan dari 3,92 persen (2013) menjadi 4,01 persen (2014) dan mengalami kontraksi di level 0,03 persen pada tahun 2015 dan di tahun 2017 tumbuh menjadi 5,04 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (positif) dan atau pengurangan (negatif).

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	300 634,1	130 652,8	283 636,2	330 274,3	178 985,1
b. ADHK 2010 (<i>JutaRp</i>)	129 810,6	334 218,7	140 015,5	191 258,5	89 550,5

Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	2,51	0,98	2,01	2,22	1,12
--------------------------------------	------	------	------	------	------

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis secara rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif),

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR WILAYAH

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya termasuk pula dalam ekspor.

Secara total, nilai ekspor Musi Rawas ke luar negeri menunjukkan penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2017, dimana pada tahun 2013, nilai ekspor mencapai 43,16 trilyun rupiah dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 sebesar 30,88 trilyun rupiah. Namun pada tahun 2017, ekspor mengalami kenaikan yang cukup tajam, sebesar 59,58 trilyun rupiah.

Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2014, meskipun secara ADHB nilai ekspor mengalami penurunan, tetapi secara ADHK nilai ekspor mengalami peningkatan, yaitu tumbuh 1,51 persen. Hal ini terjadi karena selain harga beberapa komoditas ekspor menurun juga terjadi pelemahan nilai tukar rupiah.

**Tabel 14, Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	4,194,449.4	4,416,735.3	4,568,145.7	4,774,243.9	6,346,280.7
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	4,420,678.7	4,601,901.6	4,479,030.9	4,404,719.1	5,657,280.1
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	35.03	33.02	32.31	32.02	39.84
Pertumbuhan ¹⁰ Total ekspor	3,63	1,51	-11,76	-13,27	74,65

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Musi Rawas berupa barang (rata-rata 98 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Sedangkan pertumbuhan riil total ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu 74,65 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang. Sementara itu, ekspor berkontraksi pada tahun 2015 (minus 11,76 persen) dan tahun 2016 (minus 13,27 persen). Pertumbuhan negatif ekspor barang pada tahun 2015 dan 2016 ini juga didorong oleh turunnya harga beberapa komoditi unggulan hingga mencapai titik harga yang kurang ekonomis.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR WILAYAH

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori), didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi Musi Rawas, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha.

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

**Tabel 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	6 951 822,5	7 081 262,3	7 212 022,2	7 738 151,8	9 252 537,4
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	6 347 215,0	6 427 645,9	5 906 779,8	5 709 406,5	6 738 407,2
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	58.06	52.94	51.01	51.90	58.09
Pertumbuhan ¹¹ Total impor	6.46	1.27	-8.10	-3.34	18.02

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Musi Rawas terhadap ekonomi atau produk negara lain sampai tahun 2015. Pada tahun 2016 ketergantungan dari produk impor menurun hingga 36 persen dan tahun 2017 kembali menurun hingga 41,96 persen. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Musi Rawas di luar negeri baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Musi Rawas pada periode tahun 2013 sampai dengan 2015 (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Pada tahun 2015 nilai impor mengalami kenaikan yang sangat signifikan mencapai 25,26 trilyun rupiah.

Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2015 sebesar 118,92 persen. Hal ini disebabkan adanya kegiatan pembangunan LRT dan pabrik-pabrik di Musi Rawas yang membutuhkan mesin-mesin pada tahun 2015, sehingga banyak sekali barang yang diimpor dari luar negeri.

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki porsi sekitar 60 - 90 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 - 2017

<https://musirawaskab.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (Nominal)

PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Juta Rp</i>)					
- ADHB	11,972,541.7	13,376,330.4	14,139,033.7	14,909,737.5	15,927,889.7
- ADHK 2010	9,788,565.6	10,510,076.1	11,049,704.1	11,647,493.1	12,254,425.7
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB					
- ADHK 2010	3 203,78	3 529,37	3 679,16	3 830,88	4 038,49
	2 619,36	2 773,11	2 875,28	2 992,68	3 107,09
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	5.80	7.37	5.13	5.41	5.21
Jumlah penduduk (<i>jiwa</i>)	373 701	379 000	384 300	389 199	394 402
Pertumbuhan					

PDRB per-kapita Kabupaten Musi Rawas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Musi Rawas rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” menurun pada kisaran 5-7 persen pada periode 2013 hingga 2017. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata 1,50 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGGUNAAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai peranan yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Musi Rawas (sekitar 73 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Musi Rawas sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 17. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	8,947,161.1	9,850,269.0	10,365,179.3	11,094,025.5	11,717,812.0
Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	4,194,449.4	4,416,735.3	4,568,145.7	4,774,243.9	6,346,280.7
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	2,13	2,23	2,27	2,32	1,85

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 2 kali produk yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Penurunan rasio yang relatif tajam pada tahun 2017 (1,85) lebih disebabkan karena peningkatan nilai ekspor dan konsumsi rumah tangga juga meningkat. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat dan nilai ekspor pun semakin meningkat. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh

perubahan volume maupun harga. Selain itu, penurunan yang relatif tajam dari tahun 2016 ke tahun 2017 disebabkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan ekspor untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap).

**Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	8,947,161.1	9,850,269.0	10,365,179.3	11,094,025.5	11,717,812.0
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	4,216,086.9	4,637,906.8	4,596,949.6	4,968,024.9	5,220,685.3
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,12	2,12	2,25	2,23	2,24

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung bertambah, dari sebesar 2,12 pada tahun 2013 menjadi 2,24 pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena kenaikan nilai investasi lebih lambat dibandingkan dengan konsumsi akhir rumah tangga yang mengalami percepatan.

4.4 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 19. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah tangga	8,947,161.1	9,850,269.0	10,365,179.3	11,094,025.5	11,717,812.0
b. LNPRT	131,312.0	160,728.3	177,084.1	191,225.1	203,188.4
c. Pemerintah	1,134,720.6	1,261,300.6	1,360,061.0	1,290,095.5	1,513,475.7
Jumlah	10,213,193.7	11,272,297.9	11,902,324.4	12,575,346.2	13,434,476.1
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	11,972,541.7	13,376,330.4	14,139,033.7	14,909,737.5	15,927,889.7
Proporsi	85,31	84,27	84,18	84,34	84,35

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 80 persen). Konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, diikuti juga proporsinya terhadap PDRB. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau eskpor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri/provinsi. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	4,194,449.4	4,416,735.3	4,568,145.7	4,774,243.9	6,346,280.7
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	4,216,086.9	4,637,906.8	4,596,949.6	4,968,024.9	5,220,685.3
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,99	0,95	0,99	0,96	1,22

Pada periode 2013 - 2017 ekspor Musi Rawas ke luar wilayah mempunyai nilai yang lebih rendah dari PMTB (Tabel 20). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara/provinsi lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2013 - 2017 berkisar antara 2,02 (2013) sampai 2,08 (2017). Rasio ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari PDRB Provinsi Musi Rawas tergantung terhadap produk luar negeri dan luar provinsi Musi Rawas.

**Tabel 21. Rasio PDRB terhadap Impor
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013—2017**

U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	11,972,541.7	13,376,330.4	14,139,033.7	14,909,737.5	15,927,889.7
Total Impor (ADHB) (Juta Rp)	6,951,822.5	7,081,262.3	7,212,022.2	7,738,151.8	9,252,537.4
Rasio PDRB terhadap Impor	1,72	1,89	1,96	1,93	1,72

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari Tabel 22, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir regional Musi Rawas, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Musi Rawas, dengan rentang 33-36 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 67 persen dari hasil produksi regional Musi Rawas. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 18,9 trilyun rupiah (2013) menjadi sebesar 25,18 trilyun rupiah (2017).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi regional Musi Rawas masing-masing sebesar 11,9 trilyun rupiah (2013) dan meningkat menjadi 15,9 trilyun rupiah pada tahun 2017. Karena produk di dalam regional Musi Rawas tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 6,9 trilyun rupiah (2013) menjadi 9,2 trilyun rupiah pada tahun 2017.

**Tabel 22. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kabupaten Musi Rawas , Tahun 2013—2017**

U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB)	11,972,541.7	13,376,330.4	14,139,033.7	14,909,737.5	15,927,889.7
(Juta Rp)					
%	(63,27)	(65,39)	(66,22)	(65,83)	(63,26)
Total nilai Impor ADHB	6,951,822.5	7,081,262.3	7,212,022.2	7,738,151.8	9,252,537.4
(Juta Rp)					
%	(36,73)	(34,61)	(33,78)	(34,17)	(36,74)
<u>Total Permintaan Akhir¹</u>					
	18,924,364.2	20,457,592.7	21,351,056.0	22,647,889.3	25,180,427.1
(Juta Rp)					
%	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

4.8 NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dan luar provinsi dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

¹ Termasuk diskrepansi statistik

**Tabel 23. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Luar Negeri,
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013—2017**

U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	4,194,449.4	4,416,735.3	4,568,145.7	4,774,243.9	6,346,280.7
Nilai Impor (ADHB) (Juta Rp)	6,951,822.5	7,081,262.3	7,212,022.2	7,738,151.8	9,252,537.4
Net ekspor (X – M) (Juta Rp)	-2,757,373.1	-2,664,527.1	-2,643,876.5	-2,963,907.9	-2,906,256.7
Rasio ekspor terhadap Impor	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7

Selama periode 2013 - 2017, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Musi Rawas dengan luar wilayah, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Musi Rawas selalu dalam posisi defisit. Nilai impor yang lebih besar dari ekspor menyebabkan adanya aliran devisa keluar, yang dalam konteks lain disebut sebagai “pinjaman luar negeri”. Defisit perdagangan luar wilayah di Kabupaten Musi Rawas yang terjadi antara tahun 2013 sampai dengan 2017 tercatat masing-masing sebesar -2,8 trilyun rupiah; 28,1 trilyun rupiah; 11,7 trilyun rupiah; 14,4 trilyun rupiah dan 49,8 trilyun rupiah. Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung menurun dari tahun 2013-2015. Pada tahun 2013 sekitar 5,28 turun menjadi -2,64 pada tahun 2015. Namun mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang mencapai -2,91.

4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu

unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.
Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

dengan : I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Data di bawah menunjukkan besaran ICOR meningkat dari sebesar 6,77 (2013) menjadi 6,86 (2015). Namun, pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan hingga mencapai 6,7.

**Tabel 24. Incremental Capital Output Ratio
Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Juta Rp)	9,788,565.6	10,510,076.1	11,049,704.1	11,647,493.1	12,254,425.7
Perubahan (Juta Rp)	536,278.5	721,510.5	539,628.0	597,789.0	606,932.6
PMTB (ADHK 2010) (Juta Rp)	3,631,284.0	3,698,644.7	3,699,834.9	3,869,732.3	4,064,864.7
ICOR	6,77	5,13	6,86	6,47	6,7

BAB V

PENUTUP

<https://musirawaskab.bps.go.id>

1. PDRB menurut penggunaan tahun 2013 hingga 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Sumatera Selatan pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi penggunaan akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir baik untuk tujuan konsumsi akhir investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Tiga kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT dan pemerintah,
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi investasi dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 hingga 2017 sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut penggunaan dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan *disposable*, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat telah disajikan di sini seperti ekspor dan impor dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Rawas

(Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8,947,161.1	9,850,269.0	10,365,179.3	11,094,025.5	11,717,812.0
	1 Makanan dan Minuman Non Beralkohol	4,276,358.3	4,741,388.2	4,729,195.1	5,055,089.7	5,323,807.0
	2 Minuman Beralkohol dan Rokok	787,495.4	933,255.6	1,088,500.0	1,204,648.5	1,263,215.7
	3 Pakaian	538,893.6	613,445.2	660,156.2	687,638.5	718,577.2
	4 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	740,215.1	803,374.8	869,140.1	929,380.3	972,396.7
	5 Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	125,752.8	127,498.3	142,744.0	141,763.1	148,730.7
	6 Kesehatan	223,957.2	232,364.2	242,509.1	253,710.0	269,849.8
	7 Transportasi/Angkutan	619,909.6	717,110.6	782,657.7	837,187.0	891,728.1
	8 Komunikasi	236,070.6	240,032.8	260,309.3	272,134.6	291,632.1
	9 Rekreasi dan Budaya	27,914.4	32,658.5	34,541.7	35,449.5	38,438.9
	10 Pendidikan	496,314.0	508,330.9	573,510.7	621,236.0	673,131.9
	11 Penginapan dan Hotel	361,438.0	388,153.5	433,007.4	467,186.5	493,836.0
	12 Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	512,842.2	512,656.3	548,908.0	588,601.8	632,468.0
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	131,312.0	160,728.3	177,084.1	191,225.1	203,188.4
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,134,720.6	1,261,300.6	1,360,061.0	1,290,095.5	1,513,475.7
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,216,086.9	4,637,906.8	4,596,949.6	4,968,024.9	5,220,685.3
	1 Bangunan	2,968,580.7	3,228,353.7	3,127,278.2	3,344,646.4	3,555,495.6
	2 Non-Bangunan	1,247,506.2	1,409,553.1	1,469,671.3	1,623,378.5	1,665,189.7
5	Perubahan Inventori	300,634.1	130,652.8	283,636.2	330,274.3	178,985.1
6	Ekspor	4,194,449.4	4,416,735.3	4,568,145.7	4,774,243.9	6,346,280.7
7	Impor	6,951,822.5	7,081,262.3	7,212,022.2	7,738,151.8	9,252,537.4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		11,972,541.7	13,376,330.4	14,139,033.7	14,909,737.5	15,927,889.7

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Rawas

(Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,849,625.9	7,163,318.5	7,438,519.6	7,754,769.8	7,943,178.1
	1 Makanan dan Minuman Non Beralkohol	3,320,679.6	3,440,463.1	3,486,565.3	3,635,934.1	3,719,654.4
	2 Minuman Beralkohol dan Rokok	603,825.3	619,976.8	646,325.8	678,888.4	695,720.6
	3 Pakaian	421,096.9	466,617.4	487,852.0	498,468.7	507,626.2
	4 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	487,025.6	496,717.4	523,079.2	544,380.6	552,526.2
	5 Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	112,765.9	117,680.1	130,755.2	133,711.9	135,656.2
	6 Kesehatan	221,957.2	229,364.2	236,509.1	248,710.0	254,461.5
	7 Transportasi/Angkutan	459,331.0	511,189.4	550,283.1	576,664.9	593,335.9
	8 Komunikasi	216,070.6	237,032.8	252,309.3	268,134.6	281,845.0
	9 Rekreasi dan Budaya	20,823.6	22,591.2	23,161.3	23,867.5	24,416.1
	10 Pendidikan	286,503.9	299,295.4	333,633.1	350,026.3	360,183.6
	11 Penginapan dan Hotel	266,628.5	280,621.0	303,422.6	311,955.7	317,910.4
	12 Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	432,918.0	441,769.6	464,623.7	484,027.0	499,842.1
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	114,256.2	127,876.4	137,121.9	145,111.2	149,936.6
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	990,125.1	1,011,761.9	1,061,961.2	991,308.7	1,088,023.0
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,631,284.0	3,698,644.7	3,699,834.9	3,869,732.3	4,064,864.7
	1 Bangunan	2,336,439.4	2,351,876.8	2,355,895.2	2,483,260.2	2,649,445.0
	2 Non-Bangunan	1,294,844.6	1,346,767.9	1,343,939.7	1,386,472.1	1,415,419.6
5	Perubahan Inventori	129,810.6	334,218.7	140,015.5	191,258.5	89,550.5
6	Ekspor	4,420,678.7	4,601,901.6	4,479,030.9	4,404,719.1	5,657,280.1
7	Impor	6,347,215.0	6,427,645.9	5,906,779.8	5,709,406.5	6,738,407.2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		9,788,565.6	10,510,076.1	11,049,704.1	11,647,493.1	12,254,425.7

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Rawas

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	74.73	73.64	73.31	74.41	73.57
	1 Makanan dan Minuman Non Beralkohol	35.72	35.45	33.45	33.90	33.42
	2 Minuman Beralkohol dan Rokok	6.58	6.98	7.70	8.08	7.93
	3 Pakaian	4.50	4.59	4.67	4.61	4.51
	4 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	6.18	6.01	6.15	6.23	6.10
	5 Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	1.05	0.95	1.01	0.95	0.93
	6 Kesehatan	1.87	1.74	1.72	1.70	1.69
	7 Transportasi/Angkutan	5.18	5.36	5.54	5.62	5.60
	8 Komunikasi	1.97	1.79	1.84	1.83	1.83
	9 Rekreasi dan Budaya	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24
	10 Pendidikan	4.15	3.80	4.06	4.17	4.23
	11 Penginapan dan Hotel	3.02	2.90	3.06	3.13	3.10
	12 Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	4.28	3.83	3.88	3.95	3.97
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.10	1.20	1.25	1.28	1.28
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.48	9.43	9.62	8.65	9.50
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	35.21	34.67	32.51	33.32	32.78
	1 Bangunan	24.79	24.13	22.12	22.43	22.32
	2 Non-Bangunan	10.42	10.54	10.39	10.89	10.45
5	Perubahan Inventori	2.51	0.98	2.01	2.22	1.12
6	Ekspor	35.03	33.02	32.31	32.02	39.84
7	Impor	58.06	52.94	51.01	51.90	58.09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Rawas

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.32	4.58	3.84	4.25	2.43
	1 Makanan dan Minuman Non Beralkohol	6.32	3.61	1.34	4.28	2.30
	2 Minuman Beralkohol dan Rokok	4.34	2.67	4.25	5.04	2.48
	3 Pakaian	4.16	10.81	4.55	2.18	1.84
	4 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	5.32	1.99	5.31	4.07	1.50
	5 Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	8.83	4.36	11.11	2.26	1.45
	6 Kesehatan	7.18	3.34	3.12	5.16	2.31
	7 Transportasi/Angkutan	3.24	11.29	7.65	4.79	2.89
	8 Komunikasi	1.69	9.70	6.44	6.27	5.11
	9 Rekreasi dan Budaya	8.92	8.49	2.52	3.05	2.30
	10 Pendidikan	6.60	4.46	11.47	4.91	2.90
	11 Penginapan dan Hotel	5.17	5.25	8.13	2.81	1.91
	12 Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1.74	2.04	5.17	4.18	3.27
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10.36	11.92	7.23	5.83	3.33
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.14	2.19	4.96	-6.65	9.76
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.20	1.86	0.03	4.59	5.04
	1 Bangunan	5.93	0.66	0.17	5.41	6.69
	2 Non-Bangunan	3.92	4.01	-0.21	3.16	2.09
5	Perubahan Inventori	-65.64	157.47	-58.11	36.60	-53.18
6	Ekspor	14.71	4.10	-2.67	-1.66	28.44
7	Impor	6.46	1.27	-8.10	-3.34	18.02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.80	7.37	5.13	5.41	5.21

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Rawas

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	130.62	137.51	139.34	143.06	147.52
	1 Makanan dan Minuman Non Beralkohol	128.78	137.81	135.64	139.03	143.13
	2 Minuman Beralkohol dan Rokok	130.42	150.53	168.41	177.44	181.57
	3 Pakaian	127.97	131.47	135.32	137.95	141.56
	4 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	151.99	161.74	166.16	170.72	175.99
	5 Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	111.52	108.34	109.17	106.02	109.64
	6 Kesehatan	100.90	101.31	102.54	102.01	106.05
	7 Transportasi/Angkutan	134.96	140.28	142.23	145.18	150.29
	8 Komunikasi	109.26	101.27	103.17	101.49	103.47
	9 Rekreasi dan Budaya	134.05	144.56	149.14	148.53	157.43
	10 Pendidikan	173.23	169.84	171.90	177.48	186.89
	11 Penginapan dan Hotel	135.56	138.32	142.71	149.76	155.34
	12 Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	118.46	116.05	118.14	121.61	126.53
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	114.93	125.69	129.14	131.78	135.52
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	114.60	124.66	128.07	130.14	139.10
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	116.10	125.39	124.25	128.38	128.43
	1 Bangunan	127.06	137.27	132.74	134.69	134.20
	2 Non-Bangunan	96.34	104.66	109.36	117.09	117.65
5	Perubahan Inventori	231.59	39.09	202.57	172.68	199.87
6	Ekspor	94.88	95.98	101.99	108.39	112.18
7	Impor	109.53	110.17	122.10	135.53	137.31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		122.31	127.27	127.96	128.01	129.98

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Rawas

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.59	5.27	1.33	2.67	3.12
	1 Makanan dan Minuman Non Beralkohol	10.53	7.01	-1.58	2.50	2.95
	2 Minuman Beralkohol dan Rokok	7.76	15.42	11.88	5.36	2.32
	3 Pakaian	5.53	2.73	2.93	1.94	2.61
	4 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	5.67	6.41	2.73	2.75	3.09
	5 Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	-6.46	-2.85	0.76	-2.88	3.41
	6 Kesehatan	0.42	0.40	1.21	-0.51	3.96
	7 Transportasi/Angkutan	2.52	3.94	1.39	2.07	3.52
	8 Komunikasi	2.96	-7.31	1.88	-1.63	1.95
	9 Rekreasi dan Budaya	2.50	7.84	3.16	-0.41	6.00
	10 Pendidikan	7.16	-1.96	1.21	3.25	5.30
	11 Penginapan dan Hotel	7.88	2.04	3.17	4.94	3.72
	12 Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	4.87	-2.04	1.80	2.93	4.05
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.78	9.36	2.75	2.04	2.84
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.27	8.78	2.73	1.62	6.89
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.42	8.00	-0.91	3.33	0.04
	1 Bangunan	7.69	8.04	-3.30	1.47	-0.36
	2 Non-Bangunan	-5.67	8.63	4.48	7.07	0.48
5	Perubahan Inventori	81.28	-83.12	418.20	-14.76	15.74
6	Ekspor	-6.22	1.15	6.27	6.27	3.50
7	Impor	4.13	0.59	10.83	11.00	1.31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2.98	4.06	0.54	0.04	1.54

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

<https://musirawaskab.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*. Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series. No. 29. Washington DC. 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3. New York, 1968.
16. _____, *Input-Output Table and Analysis*. Studies in Methods. Series F No. 14 Rev 1. New York. 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
18. _____, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50. New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76. New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward. Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC. 1993



DATA

Mencerdaskan Bangsa